

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah di uraikan pada Bab IV(Empat) mengenai Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun sudah ada peraturan bupati untuk implementasi kebijakan, pelaksanaannya masih belum mencapai tingkat maksimal.
2. Walaupun sudah ada komunikasi dan koordinasi antar lintas organisasi perangkat daerah, program, dan forum kepala desa, implementasi program masih belum maksimal karena pengaruh pandemi Covid19. Peraturan-peraturan pelaksanaan sudah ada sebagai panduan, namun masih perlu lebih banyak sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap program penanggulangan stunting.
3. Sumber Daya yang kurang, seperti staf, dana dan akses posyandu serta sarana dan prasarana perlu diatasi untuk mengoptimalkan implementasi program.
4. Sikap dan komitmen pelaksana program gizi terhadap penurunan angka *stunting* sangat mendukung dan terlihat melalui pengalangan komitmen saat rembuk *stunting* yang dihadiri berbagai pihak termasuk Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah, Camat, Kepala Puskesmas, dan Kepala Desa di desa yang menjadi fokus penurunan stunting.

5. Struktur birokrasi sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman aksi konvergensi/integrasi stunting dan setiap bagian bekerja sesuai dengan keahliannya.
6. Masih terdapat hambatan pada orang tua sasaran, karena mereka cenderung mengabaikan saran dari pelaksana program mengenai kebersihan lingkungan untuk pencegahan stunting.

## **5.2 Saran**

Saran untuk perbaikan dalam implementasi program gizi terhadap angka *stunting* di Desa Gununglurah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi menyeluruh kepada stakeholder seperti camat dan pemerintah desa bersama tim penanggulangan stunting yang diinisiasi kepala daerah secara langsung.
2. Rutin mengadakan rapat, berdiskusi, dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
3. Memperbaiki kekurangan seperti Sumber Daya Manusia, perancangan anggaran, sarana dan prasarana, serta alat komunikasi di fasilitas terutama di tingkat puskesmas, untuk mendukung pelayanan gizi masyarakat yang prima.
4. Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan khususnya dokter, bidan, kader posyandu dan kesmas, seperti workshop atau diskusi

kasus dengan ahlinya dalam pelatihan tatalaksanagizi buruk dan pemberian makanan bayi dan anak.

5. Meningkatkan peran dan koordinasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, forum wanita termasuk TP-PKK( Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga) di tingkat kecamatan dan desa.

6. melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan mengalokasikan anggaran sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.

7. meningkatkan kapasitas kader posyandu dalam melakukan pengukuran, penimbangan, dan penyuluhan.

